

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

2022

PERGUB SUMUT NO. 31, BD 2022/ NO. 31, 19 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

- ABSTRK : - bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk meningkatkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilaksanakan pendidikan anti korupsi.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 30 Tahun 2002; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 120 Tahun 2018; Permendikbud No.20 Tahun 2018; Pergub No. 38 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 32 Tahun 2021; Pergub No. 3 Tahun 2019.
 - Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan anti korupsi.
Pelaksanaan Pendidikan anti korupsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. Peserta Didik;
 - b. Pegawai ASN;
 - c. Pegawai BUMD; dan
 - d. Peran serta masyarakat.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Oktober 2022, ditetapkan 6 Oktober 2022.
- Lampiran : -